



Komisi Informasi Susun Standar Pelayanan untuk Desa

YOGYA (KR) - Keterbukaan informasi publik hingga saat ini ternyata belum dipahami secara baik oleh masyarakat, termasuk instansi publik. Pemerintahan desa juga mendominasi sengketa informasi publik yang disampaikan ke Komisi Informasi DIY. Hal ini pun mendorong lembaga tersebut untuk menyusun standar layanan informasi publik bagi desa.

"Dari seluruh provinsi di Indonesia baru Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur yang berupaya menyusun standar layanan mengenai informasi publik. Kemudian tahun ini DIY juga menginisiasi, tapi akan kami pertajam untuk desa," papar Ketua Komisi Informasi DIY, Hazwan Iskandar Jaya di Balaikota, kemarin.

Dipilihnya desa sebagai target penerapan standar layanan informasi publik, lantaran mendominasi laporan sengketa yang diajukan pemohon ke Komisi Informasi DIY. Hazwan menegaskan, lembaganya memiliki tugas dalam menyelesaikan persengketaan terkait permohonan informasi. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005